

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 1 dan 7

Pemkot Nunggak Bayar BPJS

Program UHC Rp 5,5 M per Bulan

SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang diklaim masih menunggak pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 11,9 miliar. Premi ini untuk membayar para peserta

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui program Universal Health Coverage atau UHC.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Widoyono menjelaskan, jika tunggakan Pemkot Semarang kepada BPJS Kesehatan tidak sampai Rp 11,9 miliar,

▶ Baca *Pemkot...* hal 7

- Jumlah peserta UHC sebanyak 254.620 jiwa
- Program UHC menggandeng BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya pengobatan rumah sakit kelas III.
- Total iuran premi Kota Semarang ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 5,5 miliar per bulan.
- Jumlah tagihan premi belum dibayar ke BPJS Kesehatan kurang dari Rp 11 miliar.

Sambutan dari hal.1

lantaran dinas sudah membayar separoh dari jumlah tagihan sebesar Rp 5,5 miliar.

"Premi tagihan BPJS Kesehatan untuk pasien UHC satu bulan sebesar Rp 5,5 miliar. Pada bulan Agustus sudah dibayar, saya kemarin tanda tangan untuk itu. Yang belum itu September sisanya, jadi tidak Rp 11 miliar," katanya, Kamis (27/9) kemarin.

Ia mengakui, untuk premi bulan September memang belum dibayarkan, hal tersebut lantaran ada sejumlah biaya tambahan membengkak dari jumlah rata-rata. Selain itu, ditambah dengan sejumlah biaya tambahan, yakni meningkatnya jumlah pengguna UHC yang ditanggung Pemkot Semarang.

"Total sekarang jumlah peserta JKN yang ditanggung Pemkot Semarang melalui program UHC mencapai 254.620 jiwa. Jumlah ini terus meningkat karena kita aktif menyosialisasikan ke masyarakat, terutama kalangan tidak mampu," imbuh Widoyono.

Menurut dia, seharusnya BPJS Kesehatan Semarang tidak perlu membeberkan terkait utang Pemkot Semarang. Hal itu dikarenakan sesuai dengan perjanjian tagihan UHC bisa dibayarkan paling lambat hingga tahun depan, dikarenakan program UHC Pemkot Semarang sendiri dikeluarkan pada November 2017 atau setelah APBD ditetapkan.

"Dulu awalnya, UHC bisa dibayar lewat Silpa. Tapi, ternyata pembangunan di Semarang berjalan cepat sehingga Silpa-nya semakin menipis, juga ada perjanjian kalau UHC itu bisa dibayar tahun depan soalnya anggarannya sudah ditetapkan," tuturnya.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Semarang, Bimantoro R mengatakan, jika Pemkot Semarang masih menunggak pembayaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) program Universal Health Coverage (UHC) yang nilainya mencapai Rp 11,9 miliar yang merupakan tagihan yang belum dibayarkan selama Agustus dan September. "Utang itu adalah tagihan selama Agustus dan September yang jumlah totalnya Rp11,9 miliar," ujarnya.

Sekedar diketahui, program UHC adalah salah satu program penjaminan di bidang kesehatan yang digagas Pemkot Semarang untuk seluruh warga Kota Lempia sejak akhir November 2017 lalu. Program ini menggandeng BPJS Kesehatan dalam menanggung biaya pengobatan rumah sakit untuk kelas III. "Kami juga harus bayar Puskesmas, rumah sakit, totalnya hampir Rp 12 miliar belum dibayarkan," katanya. (den/aro)